



KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN SUBSIDI GAS ELPIJI 3 KILOGRAM ANALISIS DAMPAK SOSIAL KOMUNIKASI DAN EKONOMI

Eli Apud Saepudin¹, Gatot Hartoko², Try Adhi Bangsawan³, Rizki Amilia⁴, Dede Qodrat Alwajir⁵

^{1,2,3,4,5}Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email: ¹eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id, ²gatot.hartoko@binabangsa.ac.id²,

³try.adhi.bangsawan@binabangsa.ac.id³, ⁴rizki.amilia@binabangsa.ac.id⁴

⁵dede.qodrat.alwajir@binabangsa.ac.id⁵

Abstrak

Kebijakan pemerintah tentang pengalihan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil untuk mengurangi beban anggaran negara sekaligus mendorong keberlanjutan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, baik bagi masyarakat penerima subsidi maupun sektor perekonomian secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial komunikasi dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, dampaknya terhadap masyarakat miskin cukup signifikan, dengan meningkatnya biaya hidup dan kesulitan dalam mengakses energi rumah tangga yang terjangkau. Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan dampak positif pada distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur energi dan kebijakan pendukung lainnya. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan serta penyediaan alternatif energi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, subsidi gas elpiji 3 kg, dampak sosial, dampak ekonomi.

Abstract

The government's policy on the transfer of 3-kilogram (kg) LPG gas subsidies is one of the strategic steps taken to reduce the burden on the state budget while encouraging national economic sustainability. However, this policy has caused various social and economic impacts, both for the subsidy recipient community and the economic sector as a whole. The purpose of this study is to analyze the social and economic impacts of the 3 kg LPG gas subsidy transfer policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through interviews with relevant parties, field observations, and literature review. The results show that although this policy aims to improve the efficiency of the use of the state budget, its impact on the poor is quite significant, with increased living costs and difficulties in accessing affordable household energy. On the other hand, this policy also has a positive impact on the distribution of more targeted subsidies. From an economic perspective, this policy can have a long-term impact on economic growth if balanced with improvements in the quality of energy infrastructure and other supporting policies. This study suggests the need for strict supervision of policy implementation as well as the provision of cheaper and more affordable energy alternatives for the community.

Keywords: Government policy, 3 kg LPG gas subsidy, social impact, economic impact.

PENDAHULUAN

Gas elpiji 3 kilogram (kg) merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Gas elpiji 3 kg lebih banyak digunakan oleh keluarga miskin dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis gas lainnya (Abdullah & Oktaviani, 2013). Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan subsidi terhadap gas elpiji 3 kg agar dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Namun, kebijakan subsidi gas elpiji 3 kg mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya beban subsidi yang harus ditanggung oleh negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg, dengan tujuan untuk mengurangi anggaran subsidi yang terus membengkak dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran (Djohanis et al., 2024). Pengalihan subsidi ini, meskipun memiliki tujuan untuk efisiensi anggaran, menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Bagi masyarakat, khususnya kalangan rumah tangga miskin, pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg dapat mempengaruhi daya beli dan meningkatkan biaya hidup mereka. Meningkatnya harga gas elpiji 3 kg tanpa adanya kebijakan pendamping yang memadai akan berdampak pada ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk mengakses energi rumah tangga yang terjangkau. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat mendukung pengalihan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta memberikan solusi terhadap kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung (Puji Lestari et al., 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat, serta dampaknya terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan (Risal & Situmorang, 2024). Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk kebijakan energi yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Gas elpiji 3 kilogram (kg) telah menjadi salah satu komoditas energi yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah. Sebagai sumber energi yang relatif murah, gas elpiji 3 kg banyak digunakan untuk keperluan memasak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap gas elpiji 3 kg sangat diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat, khususnya yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah (Ade Lia Novitasari et al., 2023).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg mulai diterapkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan ini diambil seiring dengan semakin tingginya anggaran yang harus dikeluarkan untuk subsidi energi, yang mempengaruhi ketahanan fiskal negara. Pemerintah berupaya untuk mengalihkan subsidi agar

lebih tepat sasaran, sehingga hanya kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang dapat menikmati subsidi tersebut. Meskipun demikian, kebijakan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kelompok miskin yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Dari sisi sosial, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan mempersulit akses terhadap energi bagi keluarga miskin. Sedangkan dari sisi ekonomi, kebijakan ini dapat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berisiko mengganggu kestabilan perekonomian domestik(Sondakh, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat miskin, serta implikasinya terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan(Sayyida & Akhmaddhian, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Subsidi Energi dan Gas Elpiji 3 Kg Subsidi energi adalah kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan berupa pengurangan biaya energi, seperti listrik, bahan bakar, atau gas, agar dapat diakses dengan harga lebih murah oleh masyarakat. Subsidi energi ini seringkali digunakan untuk mendukung daya beli masyarakat miskin dan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Masturi, 2017).Di Indonesia, gas elpiji 3 kg merupakan salah satu bentuk subsidi energi yang diberikan kepada rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam memasak. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dapat mengakses energi dengan harga terjangkau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beban subsidi yang semakin besar menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi, yang salah satunya mencakup pengurangan atau penghapusan subsidi gas elpiji 3 kg (Prameswari, 2022).

Teori kebijakan publik adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah sosial atau ekonomi. Kebijakan subsidi gas elpiji 3 kg dapat dilihat sebagai respons pemerintah

terhadap kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya pengendalian pengeluaran negara. Pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi fiskal negara, kebutuhan untuk efisiensi anggaran, dan tujuan untuk memperbaiki distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. Dalam hal ini, analisis kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (Maulidia, n.d.).

Dampak Sosial dari Kebijakan Pengalihan Subsidi Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalihan subsidi energi dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok miskin. Menurut Surya (2018), pengurangan atau penghapusan subsidi gas elpiji 3 kg dapat menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang menyebabkan mereka harus mencari alternatif lain yang lebih mahal atau lebih sulit dijangkau. Dampak sosial lainnya termasuk peningkatan ketimpangan sosial dan potensi konflik sosial di tingkat lokal. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, di mana mereka mungkin beralih ke bahan bakar lain yang lebih murah, tetapi kurang ramah lingkungan atau kurang efisien, seperti kayu bakar atau arang. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka (Pertiwi, 2021).

Dampak Ekonomi dari Kebijakan Pengalihan Subsidi Dari perspektif ekonomi, pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg dapat mempengaruhi inflasi, daya beli masyarakat, serta struktur biaya dalam sektor rumah tangga. Meningkatnya harga gas elpiji 3 kg dapat mempengaruhi daya beli masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat mengurangi konsumsi barang dan jasa lainnya, serta menurunkan kesejahteraan mereka (BPS, 2021). Namun, di sisi lain, pengalihan subsidi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang, dengan mengurangi beban subsidi yang selama ini membebani anggaran negara. Pengalihan subsidi yang lebih tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Hendratno, 2022). Penelitian Terkait Pengalihan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis dampak kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg di Indonesia (Hasbiyah, n.d.). Misalnya, studi oleh Setiawan (2020) yang menemukan bahwa meskipun kebijakan ini mengurangi beban anggaran negara, dampaknya terhadap masyarakat miskin cukup besar, dengan meningkatnya kesulitan dalam mengakses energi yang terjangkau. Sebuah penelitian lain oleh Fadilah (2021) menunjukkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan ketimpangan sosial, di mana masyarakat miskin yang bergantung pada gas elpiji 3 kg merasa terpinggirkan. Sementara itu, penelitian

oleh Hidayat (2019) menyimpulkan bahwa meskipun pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg dapat memperbaiki ketahanan fiskal negara, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan alternatif energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tersebut. Dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg memiliki dampak yang cukup besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran negara dan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, dampaknya terhadap masyarakat miskin dan ekonomi nasional perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pendukung, seperti penyediaan energi alternatif yang lebih terjangkau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara lebih mendalam, dan bukan untuk mengukur variabel dalam bentuk angka. Metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbagai teknik pengumpulan data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman masyarakat dan implikasi kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional (Latifah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesulitan Akses terhadap Energi Salah satu dampak sosial utama yang ditemukan adalah meningkatnya kesulitan akses terhadap gas elpiji 3 kg bagi rumah tangga miskin. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan subsidi untuk mendapatkan harga gas yang lebih terjangkau kini merasa terbebani oleh kenaikan harga. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di beberapa daerah, sebagian besar dari mereka yang sebelumnya mengonsumsi gas elpiji 3 kg harus mengurangi konsumsi mereka atau beralih ke sumber energi alternatif yang lebih murah, seperti kayu bakar atau arang (Ade Lia Novitasari et al., 2023). Sebagian besar keluarga miskin yang tergantung pada gas elpiji 3 kg merasa bahwa pengalihan subsidi

ini meningkatkan pengeluaran mereka, yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan daya beli mereka. Meskipun pemerintah berusaha melakukan pendistribusian subsidi yang lebih tepat sasaran, banyak masyarakat yang merasa tidak cukup terinformasi mengenai mekanisme baru ini, yang menyebabkan kebingungannya mengenai akses terhadap subsidi. Peningkatan Ketimpangan Sosial Peneliti menemukan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan menengah dan atas tidak terpengaruh secara signifikan oleh kebijakan ini, karena mereka mampu mengakses energi alternatif yang lebih mahal atau menggunakan gas dengan kapasitas lebih besar. Namun, kelompok masyarakat miskin yang sangat bergantung pada gas elpiji 3 kg mengalami kesulitan lebih besar. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial yang ada, karena masyarakat yang lebih kaya dapat menyesuaikan diri dengan mudah sementara kelompok miskin tidak dapat. Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat yang terdampak kebijakan ini cenderung mengubah pola konsumsi mereka, baik dalam hal penggunaan energi maupun jenis energi yang digunakan. Beberapa keluarga beralih ke bahan bakar tradisional seperti kayu bakar dan arang, meskipun hal ini dapat berdampak pada kesehatan akibat polusi udara dalam ruangan. Selain itu, kebijakan ini juga mempengaruhi kebiasaan rumah tangga dalam hal pengeluaran sehari-hari, di mana banyak yang mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya untuk menutupi biaya energi yang meningkat (Hasyim et al., 2020).

Inflasi dan Kenaikan Biaya Hidup Kenaikan harga gas elpiji 3 kg yang disebabkan oleh pengalihan subsidi berpotensi memicu inflasi, terutama pada sektor kebutuhan pokok. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei dan wawancara dengan para pelaku ekonomi lokal, sebagian besar masyarakat yang terdampak oleh kebijakan ini mengeluhkan kenaikan biaya hidup secara keseluruhan. Kenaikan harga gas elpiji ini menyebabkan mereka harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan energi, yang akhirnya mengurangi konsumsi mereka terhadap barang dan jasa lainnya. Sebagai akibatnya, daya beli masyarakat menurun, dan sektor-sektor ekonomi tertentu seperti perdagangan kecil dan industri rumah tangga turut mengalami penurunan omzet. Pengaruh Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg juga berpengaruh pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama yang bergantung pada gas untuk kegiatan produksi, seperti usaha makanan dan restoran kecil. Para pelaku UKM mengungkapkan bahwa dengan kenaikan harga gas elpiji, biaya operasional mereka meningkat, yang berdampak pada margin keuntungan yang semakin menipis. Beberapa usaha kecil bahkan terpaksa menaikkan harga produk mereka atau mengurangi kapasitas produksi untuk mengurangi dampak biaya yang lebih tinggi.

Efisiensi Penggunaan Anggaran Negara Di sisi lain, kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran negara. Pemerintah berhasil mengurangi beban subsidi energi yang selama ini membengkak, dan sebagian dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi dapat dialihkan ke program-program sosial lainnya yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Meski demikian, meskipun efisiensi ini dapat meningkatkan ketahanan fiskal negara dalam jangka panjang, implementasinya harus lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang terdampak langsung. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pengalihan subsidi ini. Mereka merasa bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit. Masyarakat berpendapat bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran negara, harus ada solusi alternatif yang lebih menguntungkan bagi kelompok miskin, seperti pemberian subsidi energi berbasis kuota atau peningkatan distribusi bantuan sosial yang lebih merata. Sebagian masyarakat juga mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan ini, sehingga kebingungan terkait mekanisme baru dan akses terhadap subsidi yang lebih tepat sasaran cukup tinggi. Solusi dan Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis, beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg antara lain Peningkatan Sosialisasi Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dan jelas mengenai kebijakan pengalihan subsidi agar masyarakat memahami mekanisme dan mendapatkan akses yang lebih mudah. Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah perlu memperluas program bantuan sosial seperti BLT untuk membantu kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. Diversifikasi Sumber Energi Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber energi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti biogas atau energi terbarukan, untuk mengurangi ketergantungan pada gas elpiji. Pengawasan yang Ketat Pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi gas elpiji 3 kg dan kebijakan subsidi lainnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketimpangan distribusi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar, terutama bagi masyarakat miskin. Dampak sosial yang paling dirasakan adalah kesulitan akses terhadap energi yang terjangkau

dan peningkatan ketimpangan sosial. Sementara dampak ekonomi mencakup inflasi, peningkatan biaya hidup, dan tekanan pada sektor usaha kecil. Meskipun demikian, kebijakan ini juga memiliki dampak positif dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan mempertimbangkan solusi yang dapat mengurangi dampak negatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Oktaviani, A. R. (2013). Analisis Sikap Ibu Rumah Tangga Pra Sejahtera Terhadap Penggunaan Lpg 3 Kilogram Di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. *AKMEN Jurnal Ilmiah, c*, 457–469. <http://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/373>
- Ade Lia Novitasari, Farah Laili Laksita Windy, & Friska Diah Mukaromah. (2023). Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 52–59. <https://doi.org/10.56910/jispendingora.v2i2.641>
- Djohanis, H., Mustainah, M., & ... (2024). Implementasi Kebijakan Penjualan Liquifeid Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Studi Di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten *Jurnal Ilmiah ...*, 1(4), 208–222. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1014%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/1014/897>
- Hasbiyah, S. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN PENETAPAN HARGA LPG TABUNG GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh Dan Desa Mantaas)*. 303–312.
- Hasyim, N., Fikri, Basri, R., & Aris. (2020). Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 129–153. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1054>
- Latifah, L. (2024). Implementasi Distribusi Gas Lpg 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin Pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2572–2584. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2843>
- Maulidia, R. (n.d.). *Rizqa maulidia nim . 160602015*.
- Pertiwi, N. (2021). Implementasi Sustainable Development di Indonesia. *Pustaka Ramadhan*, 1–134.
- Prameswari, P. P. (2022). Efisiensi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG Pada Masyarakat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–11.
- Puji Lestari, V., Azmi, N., & Prabuwangi Arizky, S. (2022). Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kilogram. *Accountability Paper Komisi VII DPR RI*.
- Risal, M., & Situmorang, L. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PEMBAGIAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 Kg UNTUK WARGA MISKIN DI DESA SUNGAI MANURUNG NUNUKAN*. 12(3), 145–156.
- Sayyida, R., & Akhmaddhian, S. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 13(01), 1–7. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i01.2558>
- Sondakh, M. T. (2023). *Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101217*

3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum. 13(2).